

JURNAL

**PERAN UNHCR DALAM PENERAPAN PRINSIP *NON REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGSI YANG MENCARI SUAKA DI WILAYAH UNI EROPA TERKAIT
YURISDIKSI *FRONTEX***



Diajukan oleh :

HENDRIKUS VIDI SUHARTANTO DJOU

NPM : 110510659

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

**PERAN UNHCR DALAM PENERAPAN PRINSIP *NON REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGSI YANG Mencari SUAKA DI WILAYAH UNI EROPA TERKAIT
YURISDIKSI *FRONTEX***



Diajukan oleh :

HENDRIKUS VIDI SUHARTANTO DJOU

NPM : 110510659

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui

pada tanggal ...7/12...-2015.....

Dosen Pembimbing

H. Untung Setyardi, SH.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Ajaya Yogyakarta



EX. Dadro Susilo, S.H., L.L.M.

**PERAN UNHCR DALAM PENERAPAN PRINSIP *NON REFOULEMENT*
TERHADAP PENGUNGSI YANG Mencari SUAKA DI WILAYAH UNI EROPA
TERKAIT YURISDIKSI *FRONTEx***

Hendrikus Vidi Suhartanto Djou, H. Untung Setyard, SH.,M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

This essay discuss about the protection of Refugees in European Union territory where this refugee has receive some treatment that against the Non Refoulement Principal in Geneva Convention 1951, and also discuss UNHCR role as the UN agency who have task to give refugee protection and in order to keep the Non Refoulement Principal going in every states, if viewed Jurisdiction of European Union border security Frontex that is set up base on Schengen Code in 1980. Problem Formulation in this research is How UNHCR role in the application of the principle of non-refoulement of refugees in the EU related to the jurisdiction of Frontex. This Legal Research conducted in Normative way, by reviewing the materials library (literature study). the data used in this research is secondary data, which include the primary legal materials, secondary, and tertiary. In this research it can be concluded that Frontex in their action as border security in European Union Territory not fully respect the Geneva Convention 1951 and New York Protocol 1967, which can lead to Massive Breach of Human Rights that can classified as Crime Against Humanity. Status determining for people that can be classified as Refugees is not the Frontex Authorities but the authority of the receiving State in accordance with the contents of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. UNHCR as the agency who have the authorities to deal with Refugee problem, react as the guardian of Non Refoulement Principal, where in their action they has a position as head of operations related to refugees and cooperation with the countries or international organizations in order to ensure the protection of refugees in the EU. UNHCR need to do some supervision In every operation relating to protection of refugee in European Union Territory that already coordinated by Frontex, and also the need for decisive action meted out to violators of the principle of non refoulement which is already classified as crimes against humanity, which can be tried at the International Human Rights Court.

Key Word : UNHCR Role, Refugees, The Non Refoulement Implementation in European Union Territory, Jurisdiction of Frontex.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengertian Pengungsi adalah sekelompok orang atau individu yang terpaksa keluar atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun ulah manusia¹. Penegrtian ini memiliki kesaamaan dengan pengarang buku *To Serve and To Protect* – Acuan Universal Penegakan HAM karangan C.de Rover yang mengartikan bahwa pengungsi adalah mereka yang keluar atau dipaksa keluar dari negrinya². pengungsi yang terpaksa atau dipaksa keluar dari Negara asalnya sangatlah rentan terhadap bahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka, oleh karena sifatnya yang rentan terhadap bahaya maka perlunya sebuah perjanjian yang dapat menjamin hak-hak dari pengungsi,

*Refugees are among the most vulnerable people in the world. The 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol help protect them. They clarify the rights of refugees and the obligations of the 148 States that are party to one or both of these instruments.*³

Prinsip *Non Refoulement* pada dasarnya terbentuk oleh hak asasi manusia yang juga menjadi pedoman penetapan hukum pengungsi. Para pengungsi yang meminta suaka di negara lain memiliki hak untuk diterima dan mendapat perlindungan di negara tersebut dan dan negara penerima tidak boleh menolak ataupun mengembalikan pengungsi tersebut di daerah asalnya.⁴ Negara penerima memiliki hak untuk melakukan *screening* guna menentukan *Eligibility* atau yang disebut penentuan status pengungsi. Dalam hasil penelitian tentang migrasi di Scotlandia, pendataan terhadap pengungsi dapat membantu pihak yang berwenang dalam menjalankan tugasnya dalam menjamin perlindungan pengungsi, dengan memonitor pergerakan pengungsi tersebut dapat pejabat yang berwenang dalam bidang perlindungan pengungsi dapat mengetahui pergerakan migrasi pengungsi yang datang, sehingga langkah-langkah awal untuk menjamin perlindungan terhadap pengungsi tersebut dapat dijalankan demi mengurangi resiko pelanggaran asas *Non Refoulement*.⁵

Penentuan status pengungsi merupakan hal yang tergolong sulit dan beresiko tinggi, karena untuk menentukan apakah pengungsi tersebut adalah seorang yang benar-benar berstatus pengungsi, ataupun hanya kaum imigran gelap yang mencoba melarikan diri dari negara asalnya karena alasan ekonomi demi mendapat kenikmatan pribadinya. Dalam hal ini diperlukan kecermatan dari petugas untuk menentukan status pengungsi⁶. Dalam situasi seperti ini petugas dihadapkan pada sebuah keraguan untuk memberi keputusan berkaitan dengan informasi terhadap pengungsi yang sedang ditanganinya. Oleh karena itu petugas harus memberikan keputusan yang menguntungkan bagi pengungsi tersebut dengan pemberian status pengungsi. Hal ini dikenal sebagai prinsip *Benefit of The Doubt*.

Peraturan tentang status pengungsi telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal dengan sebutan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). UNHCR adalah komisi khusus PBB yang bergerak di bidang pengungsi yang mengatur tentang masalah yang berkaitan dengan pengungsi. Pembentukan UNHCR dibentuk karena didasari atas krisis yang dialami setelah Perang Dunia II. Seperti kita ketahui dalam Perang Dunia II banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak sekutu maupun German dan yang paling terkenal adalah kasus *genocide* yang

¹ *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), article 1 ,of the 1951 convention relating to the status of refugees.*

² C. de Rover, 2000, *To Serve and To Protet* – Acuan Universal Penegakan HAM, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 427.

³ Antonio Guterres, *The Legal Framework for Protecting Refugees*, 2011.

⁴ *UNHCR, Op Cit, article 33.*

⁵ Emma Stewart, *The integration and onward migration of refugees in Scotland: a review of the evidence*, 2009, Department of Geography and Sociology University of Strathclyde Scotland

⁶ Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional; Sebuah Pengantar Kontekstual*, Volume 2 dari rangkaian studi IMR, Institute For Migrant Rights, Cianjur-indonesia, hlm 522.

dilakukan oleh Nazi dibawah perintah Adolf Hitler⁷. Akibat dari peristiwa itu banyak pengungsi yang mayoritas kaum Yahudi berusaha mencari perlindungan dari kejaran para tentara Nazi. Berawal dari pengalaman inilah maka PBB meresmikan UNHCR pada tahun 1951 dalam penandatanganan konvensi tentang pengungsi, namun dalam konvensi tahun 1951 masih menganut pengertian pengungsi dalam arti sempit artinya masih memiliki batasan, barulah setelah lahirnya protocol 1967 maka batasan pengertian pengungsi ini dihilangkan⁸, alasannya karena protocol sendiri merupakan instrument tambahan yang fungsinya merubah maupun melengkapi sebuah perjanjian⁹.

Fungsi UNHCR adalah mengatur dan melindungi hak-hak dari pengungsi yang meliputi jaminan atas suaka atau perlindungan di negara penerima, dalam perihal para pengungsi yang berusaha memasuki wilayah negara penerima tidak sedikit yang bermasalah dalam dokumen karena mereka memasuki wilayah tersebut dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa tanpa ada persiapan. Respon dari negara penerima seperti yang diatur dalam Pasal 31 UNHCR adalah tidak boleh menjatuhkan hukuman atas masuknya pengungsi secara illegal ke dalam wilayah teritorial negaranya tetapi memberi jaminan bagi mereka yang masuk ke negaranya sebagai bentuk maksud baik kedatangannya. Sehubungan dengan masih diperlukannya perlindungan terhadap pengungsi mengakibatkan UNHCR akan tetap ada dan menjadi alasan tetap berjalannya institusi ini¹⁰.

Terkait dengan masalah pengusiran, negara penerima tidak boleh mengusir pengungsi yang mencari suaka di negaranya atas alasan keamanan nasional walaupun kepentingan umum, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengungsi tersebut membahayakan keamanan negara. Sebagai contoh pengungsi yang dihukum atas kejahatan serius dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat negara tempat tinggalnya. Proses pengusiran tersebut haruslah melalui proses hukum dimana pengungsi juga berhak menunjukkan bukti yang membenarkan statusnya sebagai pengungsi yang sah dan beritikad baik serta menghapuskan segala tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Pasal 32 dan 33 UNHCR yang juga tertulis dalam pengertian Prinsip *Non Refoulement* dimana prinsip ini yang menjadi dasar berlakunya UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*).

Kedatangan para pengungsi ini menimbulkan berbagai macam masalah bagi negara-negara Uni Eropa, baik dalam bidang perekonomian maupun keamanan negara. Oleh karena itu perlunya menjaga keseimbangan atas kebebasan dan juga keamanan telah menjadi perhatian negara-negara Uni Eropa. Sejak tahun 1999 *European Council on Justice and Home Affairs* telah mengambil langkah untuk mengontrol arus imigrasi, pencari suaka, maupun keamanan, maka dibentuklah sebuah lembaga yang bersifat *ad-hoc* yaitu *Frontex*. *Frontex* adalah sebuah biro keamanan yang bertugas menjaga wilayah perbatasan negara-negara Uni Eropa yang kemudian diresmikan oleh *European Council* menjadi status tetap [Council Regulation \(EC\) 2007/2004](#). *Frontex* sendiri telah menangani banyak kasus yang berhubungan dengan migrasi, pencari suaka, maupun keamanan perbatasan. Namun dalam prakteknya pembentukan *frontex* ini adalah sebagai salah satu sarana untuk menekan jumlah pengungsi yang mencoba memasuki wilayah negara-negara Uni Eropa. Hal ini tentu saja melanggar aturan dalam UNHCR dan prinsip *Non Refoulement*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap pengungsi yang mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*?

⁷UNHCR *op cit*;page 2

⁸ Antonio Guterres, *Op cit*, Page 1.

⁹Syahmin A.K., 1992 *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Binacipta, Bandung.

¹⁰Jurnal Hukum, tentang *Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional*, ISSN: 0852-0941 Nomor 45 Tahun XII September-November 1998.

B. METODE

1. Jenis Penelitian Hukum

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap kasus pengungsi yang hendak mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex* maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hukum normatif tersebut berfokus pada norma hukum positif peraturan undang-undang, dalam hal ini menggunakan UNHCR sebagai bahan hukum primer.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini :

- 1) *The 1951 Convention and Protocol 1967 relating to the status of refugees*
- 2) *United Nation High Commissioner for Refugees Statute*
- 3) *Universal Declaration of Human Rights*
- 4) *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom.*
- 5) *United Nation Declaration on Territorial Asylum 1967.*
- 6) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet.
- 2) Dokumen tentang Pengungsi, peran penting UNHCR menangani masalah pengungsi, penerapan asas *Non Refoulement* oleh *Contracting State*, Yurisdiksi dan kekuatan hukum dari *Frontex* diperoleh dari mana (putusan Pengadilan Negeri tentang tindakan *Frontex* terhadap pengungsi yang hendak memasuki wilayah UNI EROPA, jumlah data tertentu yang berkaitan dengan penelitian),

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang peran UNHCR dalam penerapan prinsip *Non Refoulement* terhadap kasus pengungsi yang hendak mencari suaka di wilayah Uni Eropa terkait yurisdiksi *Frontex*. Yang bentuknya terbuka yang jawabannya belum disiapkan.

4. Narasumber

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka narasumber dari penelitian ini adalah :

- a. Kepala bagian PBB yang bertugas menangani masalah pengungsi yang memiliki Kantor Cabang di Jakarta
- b. Kepala Kedubes Italy sebagai Negara yang tempat terjadinya kasus yang berhubungan dengan penelitian
- c. Kepala Bagian kantor perwakilan negara-negara UNI EROPA
- d. Kepala bagian Kementrian Luar Negri Indonesia

5. Lokasi Penelitian

- a. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang memiliki kantor cabang di Lantai 14, Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih No.75, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia
- b. Kantor Kedubes Negara Italia di Indonesia yang beralamat di Jalan Diponegoro No.45, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, 10310, Indonesia
- c. Delegations of Eropa Union to Indonesia di lantai 16, gedung Inteland, jalan Jendral Sudirman No.32, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia
- d. Kantor Kementrian Luar Negri Indonesia beralamat di Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110

6. Metode Analisis

Peneitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan kepada suatu peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan penalaran deduktif yaitu dimana penalaran dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta Umum kesimpulan yang bersifat khusus .

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

UNHCR sebagai lembaga resmi dari Organisasi Internasional PBB merupakan agensi yang memiliki wewenang penuh mengurus masalah pengungsi didukung dengan munculnya Konvensi Geneva 1951 dan Protokol Kyoto 1967 yang merupakan dasar dari hukum pengungsi. Dalam penerapan hukum pengungsi prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip *Non Refoulement* dimana Negara penerima mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi yang datang ke Negaranya, dimana setiap Negara baik yang terikat dalam konvensi 1951 ataupun protokol 1967 ataupun yang belum terikat harus mengikuti ketentuan dari prinsip dasar hukum pengungsi ini, karena merupakan sebuah kewajiban yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Penerapan prinsip *Non Refoulement* bagi tiap Negara merupakan sebuah kewajiban yang dimana menimbulkan beban bagi Negara manapun yang kedatangan pengungsi, Bagi Negara anggota UNI EROPA kedatangan pengungsi adalah merupakan agenda khusus yang menjadi bahan pembahasan karena Eropa merupakan daerah tujuan kebanyakn para pencari suaka. Semua anggota dari UNI EROPA telah terikat dengan konvensi Geneva 1951 dan Protokol New York¹¹ artinya pengungsi yang datang ke Negara anggota UNI EROPA memiliki status sebagai pengungsi onvensi yang merupakan tanngung jawab dari Negara penerima.

¹¹ Email from EU direct.

Pemenuhan tiap hak-hak dari tiap pengungsi yang datang menyebabkan berbagai macam masalah khususnya tentang masalah anggaran dalam menanggapi masalah pengungsi, yang merupakan salah satu alasan yang menjadikan datangnya pengungsi menjadi beban bagi Negara penerima.

Dalam pengaturan pengungsi tiap negara mempunyai haknya untuk menentukan peraturannya sendiri asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum pengungsi Internasional termasuk menentukan peraturan mengenai imigrasi di perbatasan. Dibentuknya *Frontex* berdasarkan *The Schengen Code* dimana Negara anggota UNI EROPA menghilangkan *internal border* dari wilayah negaranya yang kemudian memfokuskan pada *external border*, atas dasar alasan pentingnya keamanan di *external borders* maka dibentuknya agensi khusus ini.

Wewenang *Frontex* dalam mengatur keamanan perbatasan menyebabkan agensi memiliki tanggung jawab atas tiap koordinasi yang diberikan demi menangani masalah seputar *external border*, terkait dalam kewenangan koordinasi ini mengartikan bahwa setiap tindakan yang bersangkutan dengan keamanan perbatasan yang juga tidak lepas dari masalah suaka, yang dilakukan oleh Negara anggota UNI EROPA harus memiliki persetujuan dari *Frontex*. Kedatangan para imigran yang merupakan sebuah peristiwa yang sangat sering terjadi di wilayah perbatasan luar UNI EROPA dan membutuhkan sebuah tindakan khusus dari pihak UNI EROPA

Beberapa operasi yang dikoordinasi oleh *frontex* terkait dengan menyikapi masalah perbatasan telah dilakukan, contohnya: Operasi Triton dan juga Operasi Poseidon yang dimaksudkan untuk melakukan kontrol daerah perbatasan, namun belum memenuhi tujuan dari Operasi tersebut yaitu menghindari terjadinya *Human Tragedy*.¹²

Dari berbagai data yang terkumpul setiap *Border Action* yang dibawah koordinasi dari *frontex* tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal, salah satu contohnya tragedi di laut Mediterania khususnya wilayah Lampedusa Italia, Pada tanggal 10 Oktober 2013 lebih dari 360 pengungsi tenggelam di perairan Lampedusa Italia. Gagalnya Operasi *Triton* dibawah koordinasi *Frontex* merupakan sebuah cerminan bahwa tiap *border action* yang dilakukan merupakan sebuah cacat dalam pengaturan keamanan wilayah perbatasan UNI EROPA. Beberapa Operasinya dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹³

Frontex sendiri adalah instansi yang memiliki budget yang terbilang cukup besar yaitu total €27 Juta, dimana dana tersebut digunakan untuk operasi Triton dan Poseidon.¹⁴ Menurut keterangan dari Mr. Federico Novellino, *Head of Political and Consular Section of Italian Embassy in Indonesia*, bahwa kegagalan kedua Operasi tersebut akibat jarak Lampedusa yang sangat luas, juga cuaca buruk pada saat menjalankan kedua operasi tersebut. Dalam tugasnya *Frontex* dibantu dengan perlengkapan *Hi-Tech* seperti penggunaan *Drones*, pencitraan Satelit, dan sensor bawah laut yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan pengungsi.

Mengingat setiap tindakan yang dilakukan Negara anggota UNI EROPA yang menyangkut *External Border* semuanya harus dibawah koordinasi dari *Frontex*, maka operasi *Push-Back* yang dilakukan Italy pada tanggal 6 Mei 2009 dimana pihak Italy bekerja sama dengan pemerintah Libya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemulangan kembali terhadap imigran yang hendak memasuki wilayah perairan Italia, dimana sebagian dari imigran tersebut adalah merupakan orang-orang yang berhak mendapat perlindungan internasional.

Mereka yang menjadi korban operasi *Push-back* ini dipindahkan dari kapal mereka yang semula digunakan untuk menyebrang ke armada kapal Italy dan kemudian diserahkan kepada pihak Libya, tercatat akibat operasi tersebut beberapa dari mereka perlu mendapat perawatan medis. Menurut beberapa saksi mengatakan bahwa mereka diyakinkan untuk dibawa ke Italia, sebagian dari imigran tersebut mengatakan bahwa tangan mereka diborgol dan kemudian diserahkan pada pihak

¹² <http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks/>. 9/6/2015

¹³ <https://www.wsws.org/en/articles/2013/10/28/fron-o28.html>

¹⁴ http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4957_en.htm

Lybia. Dari hasil penelitian UNHCR orang-orang yang diserahkan kepada pihak lybia adalah mereka yang perlu mendapat perlindungan internasional

*"UNHCR considers that the interception of persons on the high seas between Italy and Libya, their transfer from Italian to Libyan custody, and their return to Libya, may be at variance with the principle of non-refoulement and in contradiction to Article 3 of the ECHR."*¹⁵

Pengembalian seseorang imigran tanpa mendapatkan proses yang semstinya bisa mengakibatkan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan mengenai hukum pengungsi. Begitupun juga deportasi pengungsi yang dilakukan di perairan bebas tanpa adanya proses, yang jelas merupakan tindakan yang melanggar prinsip *Non Refoulement*.

Kibrom Andom Woldemichael adalah pengungsi yang berasal dari Eritrea, yang menjadi korban deportasi tanpa proses dari petugas perbatasan UNI EROPA dengan adanya indikasi kekerasan yang menyebabkan Kibrom Andom Woldemichael mengalami cidera di telinga bagian kanannya dan juga terpisahkan dari anaknya.¹⁶

Dari keterangan yang didapat dari email *EU Direct*, Mr. Federico Novellino, *Head of Political and Consular Section of Italian Embassy in Indonesia*. Serta studi pustaka, tidak ditemukan satupun peraturan ataupun mandat dari *EU* yang mengatakan bahwa *Frontex* mempunyai kewenangan dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikatakan pengungsi, imigran ekonomi, ataupun imigran gelap.¹⁷¹⁸

D. KESIMPULAN

Bahwa dalam melakukan tugasnya *frontex* sebagai agensi resmi dari UNI EROPA tidak sepenuhnya menghormati ketentuan dalam Konvensi Geneva 1951 dan Protokol New York 1967 yang menuntun kepada *Massive Breach of Human Rights* yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi yang dilakukan oleh *Frontex* sendiri tidak dilakukan dengan maksimal dan tanpa melihat mengindahkan hak-hak dasar seseorang, menyebabkan jatuhnya korban jiwa, disertai adanya indikasi unsur kesengajaan dengan membiarkan tragedi ini terjadi. Penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan menyebabkan terhambatnya penerapan prinsip *Non Refoulement* di wilayah UNI EROPA, karena merupakan yurisdiksi *Frontex* untuk melakukan *border action*. Penentuan status seorang pengungsi bukan merupakan kewenangan dari *Frontex* melainkan kewenangan dari Negara penerima sesuai dengan isi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

UNHCR sebagai instasi yang berwenang dalam mengurus masalah pengungsi, mempunyai peranan penting sebagai *Guardian* dalam menjamin dijalkannya prinsi *Non Refoulement*, dimana dalam tugasnya UNHCR memiliki kedudukan sebagai pimpinan dari operasi yang berkaitan dengan pengungsi serta melakukan kerjasama dengan negara-negara ataupun organisasi Internasional demi menjamin perlindungan terhadap pengungsi di UNI EROPA.

¹⁵ *Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the Case of Hirsi and Others v. Italy (Application no. 27765/09).*

¹⁶ www.wsws.org/en/articles.2013/10/28/fron-o28.html.11/6/2015.

¹⁷ *Email from EU Direct*

¹⁸ *Frontex.europa.eu*

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Antonio Guterres, 2011, *The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees and its 1967 Protocol*, UNHCR, P.O. Box 2500 1211 Geneva 2 Switzerland.
- C. de Rover, 2000, *To Serve and To Protect – Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*; Sebuah Pengantar Kontekstual, Volume 2 dari rangkaian studi IMR, *Institute For Migrant Rights*, Cianjur-indonesia.
- Syahmin A.K., 1992 *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Binacipta, Bandung.

JURNAL:

- Jurnal Hukum, tentang *Perlindungan Pengungsi Menurut Hukum Internasional*, ISSN: 0852-0941 Nomor 45 Tahun XII September-November 1998
- Jurnal Hukum, Antonio Guterres, *The Legal Framework for Protecting Refugees*, 2011

HASIL PENELITIAN

- Emma Stewart, *The integration and onward migration of refugees in Scotland: a review of the evidence*, 2009, *Department of Geography and Sociology University of Strathclyde Scotland*

WEBSITE

- Email from Europa Union direct
- www.wsws.org, Martin Kreickenbaum, EU Border agency Frontex guilty of massive breach of human rights, 29 Agustus 2014.
- Frontex.europa.eu, Frontex, Origin, 29 Agustus 2014.
- Frontex.europa.eu.
- www.reuters.com/article/2013/10/30.us-eu-parliament-elections-idUSBRE99T0YZ20131030. 10.6.2015.

PERATURAN

- United Nations High Commissioner for Refugees Statue.*

